

Abstrak

Peran dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya di singkat MPD) dalam mengawasi notaris sangatlah penting, tujuan nya agar notaris dalam melaksanakan tugas dalam jabatan nya tetap dalam koridor peraturan undang-undang serta kode etik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan dari MPD dalam mengawasi notaris dalam menetapkan honorarium di luar ketentuan undang-undang 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disingkat UUJN) dan di bawah ketentuan perkumpulan. Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara dengan mewawancarai beberapa notaris dan ketua majelis pengawas daerah sebagai responden. Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD mengenai peran nya mengawasi notaris yang menetapkan honorarium di bawah ketentuan perkumpulan serta UUJN dapat dilakukan pemanggilan jika ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat, akan tetapi MPD seharusnya bekerja serta bergerak aktif dalam hal mengawasi notaris, tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat, karena MPD menurut pasal 1 angka 6 UUJN telah memberikan kewenangan untuk memberikan pembinaan terhadap notaris.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Peranan, Honorarium.

Abstract

The role of the Regional Supervisory Council (hereinafter in the RSC briefing) in supervising a notary is very important, the goal of the notary public in carrying out his duties in his office remains within the corridor of the laws and the code of ethics. This study aims to determine the extent of the role of the RSC in overseeing notaries in setting honorariums outside the provisions of Law 30 of 2004 concerning the position of a notary public and under the provisions of the association. This type of research is normative juridical. The method used in this research is literature study and interview by interviewing several notaries and the chairman of the regional supervisory panel as respondents. The data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques and then described. The results showed that the RSC regarding its role of overseeing notaries who set honorariums under the provisions of the association and outside the provisions of Law 30 of 2004 concerning the position of a notary public can be called if there is a report in advance from the public, but RSC should work and move actively in terms of overseeing notaries, no need to wait for reports from the public because RSC according to article 1 number 6 the provisions of Law 30 of 2004 concerning the position of a notary public has given authority to provide guidance to notaries.

Keywords: Regional Supervisory Council, Notary, Role, Honorarium